



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Aparatur Desa

Muldiansyah, Reni Irianti, Intan Pramesti Dewi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM, Indonesia

Email: diansyahmul472@gmail.com, renyirianti18@gmail.com, intan_pramestidewi@stan-im.ac.id

Abstrak:

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji secara langsung keterampilan sumber daya aparat desa, penggunaan sistem keuangan desa berbasis teknologi, serta penerapan sistem pengawasan internal desa memengaruhi akuntabilitas padapenataan keuangan desa di wilayah Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini memanfaatkan data primer yang didapatkan dengan kuesioner. Responden didapatkan secara purposive, melibatkan 56 individu yang mencakup berbagai jabatan struktural desa seperti mulai kepala desa hingga kepala dusun. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari tiga variabel yang diteliti, hanya sistem pengendalian intern desa yang terbukti secara signifikan berdampak pada akuntabilitas penataan keuangan desa. Sementara itu, keterampilan aparat desa dan penggunaan sistem keuangan desa tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat akuntabilitas tersebut.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Dana Desa; Pengelolaan Keuangan

Abstract:

This study aims to explore, through empirical investigation, how various factors such as the skill level of village officials, the implementation of village financial technology systems, and the internal control mechanisms within village governance relate to the accountability of managing village funds in the Saguling District of West Bandung Regency. Adopting a quantitative research design, the researchers relied on primary data gathered via structured questionnaires. The sample was selected using purposive sampling and included 56 participants, encompassing roles such as village heads, secretaries, and officials overseeing finance, public services, governance, welfare, planning, and community subdivisions. Analysis of the collected data revealed that among the variables assessed, only the internal control systems employed by the village government showed a significant impact on fund management accountability. In contrast, the competencies of village personnel and the use of financial system technology were found to have no measurable influence on accountability outcomes.

Keywords: Accountability; Village Fund; Financial Management

Corresponding: Muldiansyah

E-mail: diansyahmul472@gmail.com



PENDAHULUAN

Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2014, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengelola wilayahnya secara mandiri guna mendorong kemajuan dan kemandirian desa. Kemandirian ini dapat dicapai melalui pemanfaatan potensi SDM yang ada setiap desa (Kahono et al., 2022). Ketentuan tersebut menempatkan pemerintah desa menjadi seseorang yang bertanggung jawab pada pengelolaan segala aspek pembangunan dan perencanaan ke depan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, aparat desa dituntut untuk menjalankan pengelolaan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, mengelola keuangan di lembaga desa perlu dilaksanakan dengan apik serta efisien terhadap anggaran. Seluruh pendapatan serta belanja desa wajib dicatat dan disusun dalam laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan

terstruktur, sesuai dengan ketentuan format APB Desa yang berlaku (Bender, 2016; Christoph et al., 2015; Esperon et al., 2015; Stüber, 2017; Zimmer et al., 2014).

Pengelolaan dana desa sampai sekarang selalu berhadapan dengan hambatan serta belum berjalan secara optimal di sejumlah wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan temuan dari LHP oleh BPK, terdapat beberapa kelemahan yang menonjol dalam tata kelola dana desa di wilayah tersebut. Salah satunya adalah kurangnya disiplin pada pelaksanaan sistem berkomunikasi serta informasi di lingkungan pemerintahan desa. Adapun, aktivitas melaporkan laporan untuk bertanggung jawab keuangan kerap menghadapi tantangan, serta pemberian informasi keuangan belum dilaksanakan secara transparan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kesan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (bpk.go.id). Sehingga perlunya kebijakan pada pengelolaan dana desa serta program pelatihan yang berasal dari pekerja pemerintahan desar dari pusat.

Kompetensi aparatur desa merujuk pada kemampuan atau keterampilan yang melekat pada individu, yang mencerminkan kualitas pribadi dan karakter yang diinginkan pada pelaksanaan kerja serta tanggung jawab dalam pekerjaan. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek, baik pengetahuan, keterampilan teknis, maupun sikap kerja yang mendukung kinerja aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa secara efektif dan profesional (Aurelia et al., 2023; Juniarti et al., 2022; Maulana & Napisah, 2021; Nurjaya et al., 2021; Sukmawidewi & Nugraha, 2021). Kemampuan aparatur desa memegang peranan penting pada penggunaan dana desa. Ketika pekerja desa mempunyai kemampuan yang cukup, sehingga potensi terjadinya salah pada proses pertanggungjawaban keuangan dapat diminimalisir. Hal ini menjelaskan jika kemampuan yang baik turut membantu menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik pula. Sejumlah penelitian juga menjelaskan jika ada kaitan yang baik diantara tingkat keterampilan pekerja desa dengan akuntabilitas dalam mengelola keuangan di desa (Aziiz et al., 2019). Meski banyak studi menunjukkan terdapat kaitan baik antara keterampilan aparatur desa dan akuntabilitas dalam penataan keuangan desa,, beberapa temuan lain justru menyajikan hasil yang berbeda. Salah satunya adalah penelitian Widyatama et al. (2017), yang menjeaskan jika kemampuan perangkat desa tidak memberikan pengaruh yang baik pada tingkat akuntabilitas pada penataan keuangan desa. Temuan ini menjelaskan jika faktor lain di luar kompetensi mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan akuntabilitas tersebut.

Satu dari banyak indikator yang turut memengaruhi penataan keuangan desa adalah memanfaatkan teknologi, khususnya melalui penggunaan aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini dibuat dalam membantu pemerintah desa pada kegiatan menyusun dan penataan laporan keuangan dengan lebih mudah, terstruktur, serta efisien. Adanya sistem ini, proses pencatatan serta pelaporan keuangan dari berbagai kegiatan desa bisa dilakukan secara lebih cepat serta akurat, dengan ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pada penataan dana desa (Putri Lestari et al., 2023) agar penataan dana desa berjalan secara disiplin, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem keuangan desa yang tersedia. Pemanfaatan sistem ini tidak hanya membantu dalam menyederhanakan tugas administrasi dan pelaporan, tetapi juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, penerapan teknologi secara maksimal menjadi salah satu kunci pada keinginan mewujudkan penataan keuangan desa yang transparan serta bisa dipercaya. Aziiz et al. (2019) menyatakan jika penggunaan teknologi serta informasi memiliki

dampak baik pada peningkatan disiplin dalam penataan dana desa. Namun, temuan tersebut tidak sejalan dengan Pahlawan et al. (2020) yang menyimpulkan jika penggunaan teknologi informasi tidak memberikan berdampak baik pada akuntabilitas keuangan desa. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa efektivitas teknologi dalam mendukung akuntabilitas mungkin didorong dengan adanya indikator lain, seperti kualitas SDM atau penerapan sistem yang belum optimal (Saputra, 2024).

Faktor terakhir yang turut memengaruhi penataan keuangan desa ialah sistem pengendalian internal desa. Sistem ini ialah serangkaian prosedur yang secara berkelanjutan dijalankan oleh pimpinan bersama seluruh aparatur desa guna memastikan tercapainya tujuan organisasi secara andal dan terkendali. Beberapa penelitian seperti oleh Aziiz & Prastiti (2019) menunjukkan jika SPIP memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas penataan dana desa. Hasil serupa juga ditemukan dalam studi oleh Widyatama et al. (2017) yang menjelaskan jika pengendalian internal membantu dalam memberikan dampak signifikan pada akuntabilitas keuangan desa. Meski demikian, tidak semua penelitian mendukung temuan tersebut. Ada pula studi yang menyebutkan jika sistem dalam mengendalikan secara internak tidak mempengaruhi pada penataan dana desa, menunjukkan bahwa efektivitas sistem ini mungkin dipengaruhi oleh implementasi dan komitmen pelaksanaannya di setiap desa.

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji topik akuntabilitas pada penataan dana desa, namun temuan-temuan yang dihasilkan masih menunjukkan adanya perbedaan dan belum memberikan kesimpulan yang konsisten. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa berbagai indikator yang memengaruhi akuntabilitas dana desa dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan konteks masing-masing wilayah, serta perbedaan dalam implementasi kebijakan, kapasitas aparatur, dan pemanfaatan teknologi di tingkat desa. Penelitian oleh Aziiz dan Prastiti (2019) menemukan bahwa tiga faktor utama, yakni kemampuan aparatur desa, penggunaan teknologi informasi melalui Siskeudes, serta SPIP, secara umum ditemukan mempunyai dampak yang baik pada akuntabilitas dalam penataan dana desa. Namun, hasil tersebut tidak selaras dengan temuan dari Widyatama et al. (2017) yang menjelaskan jika kemampuan petugas tidak memberikan dampak pada akuntabilitas keuangan desa, serta studi oleh Pahlawan et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa teknologi informasi dan pengendalian intern juga tidak berdampak signifikan. Ketidakesesuaian hasil ini mengindikasikan adanya celah penelitian (research gap), terutama berkaitan dengan perbedaan latar geografis dan struktur kelembagaan antar wilayah. Untuk itu, penelitian ini dilakukan guna mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara mendalam pengaruh ketiga variabel tersebut pada akuntabilitas penataan dana desa di wilayah Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat.

Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat kaitan ketiga variabel, yaitu kemampuan aparatur desa, pemanfaatan Siskeudes, dan sistem pengendalian internal, berdampak secara signifikan pada akuntabilitas dalam penataan dana desa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu kontribusi nyata dalam perancangan aturan penataan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi. Adapun, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur serta memperkuat sistem pengawasan internal guna membuat pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif serta terpercaya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini memiliki tujuan dalam memperoleh data yang numerik dan dapat dianalisis secara statistik. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Sumber data utama berasal dari kuesioner yang

didapatkan langsung kepada responden, yaitu perangkat desa dari enam desa yang ada di wilayah tersebut. Sampel yang digunakan menggunakan sampel jenuh, dengan seluruh populasi dijadikan sampel, responden yang didapat mencapai 56 orang. Kriteria responden meliputi jabatan seperti kepala desa, sekretaris desa, serta perangkat lainnya, dengan syarat masa kerja minimal satu tahun serta pendidikan sekurang-kurangnya lulusan SMA atau SMK. Variabel terikat pada penelitian ini ialah akuntabilitas penataan dana desa, yang diukur berdasarkan lima indikator utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penatausahaan, menggunakan skala Likert lima tingkat. Sementara itu, variabel bebas mencakup kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi melalui Siskeudes yang juga diukur dengan skala serupa. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, dengan uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji kualitas instrumen penelitian. Teknik analisis data yang digunakan mencakup regresi linear berganda, meliputi uji koefisien determinasi (R^2), uji simultan (F), dan uji parsial (t), dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Pada studi ini, peneliti menetapkan enam desa sebagai lokasi pengambilan sampel setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Dari lapangan, berhasil dikumpulkan 56 kuesioner yang disebarkan kepada aparatur desa di wilayah Kecamatan Saguling. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengabdikan diri di pemerintahan desa selama lebih dari satu dekade. Selain itu, mayoritas dari mereka mempunyai latar belakang pendidikan setingkat SMA atau yang setara.

Uji Kualitas Data

Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilaksanakan dengan pendekatan Cronbach Alpha (α) untuk menilai konsistensi internal instrumen. Suatu item dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang memadai apabila nilai α melebihi 0,70 (Ghozali, 2015, 2016).

Tabel 1. Hasil Uji Reliabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	0,891	Reliabel
Informasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,846	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi	0,886	Reliabel

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditampilkan dalam Tabel 1, seluruh variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,8, yang mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan tergolong reliabel. Kompetensi aparatur desa memperoleh nilai 0,891, informasi SPIP sebesar 0,846, dan pemanfaatan teknologi sebesar 0,886. Dengan demikian, seluruh item dalam kuesioner dapat dipercaya untuk mengukur variabel yang dimaksud secara konsisten.

Uji Validitas

Hasil uji validitas menjelaskan jika suatu pernyataan pada angket dapat dianggap valid apabila nilai r hitung melebihi nilai r tabel. Kondisi ini mengindikasikan jika item pernyataan tersebut memiliki

korelasi yang signifikan dengan total skor yang diperoleh. Jika r hitung $>$ r tabel, jika butir pernyataan tersebut dinilai mampu mengukur aspek yang dimaksud secara tepat dan layak digunakan dalam instrumen penelitian.

Tabel 2. Variabel Kompetensi Aparatur Desa

Pertanyaan	Hasil R Hitung	R Tabel	Status
X1.1	0,733	0.258	Valid
X1.2	0,779	0.258	Valid
X1.3	0,778	0.258	Valid
X1.4	0,739	0.258	Valid
X1.5	0,711	0.258	Valid
X1.6	0,695	0.258	Valid
X1.7	0,790	0.258	Valid
X1.8	0,801	0.258	Valid

Sumber: Data Olahan

Tabel 3. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pertanyaan	Hasil R Hitung	R Tabel	Status
X2.1	0,706	0.258	Valid
X2.2	0,752	0.258	Valid
X2.3	0,675	0.258	Valid
X2.4	0,692	0.258	Valid
X2.5	0,689	0.258	Valid
X2.6	0,547	0.258	Valid
X2.7	0,713	0.258	Valid
X2.8	0,659	0.258	Valid
X2.9	0,623	0.258	Valid

Sumber: Data Olahan

Tabel 4. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pertanyaan	Hasil R Hitung	R Tabel	Status
X3.1	0,534	0.258	Valid
X3.2	0,449	0.258	Valid
X3.3	0,627	0.258	Valid
X3.4	0,377	0.258	Valid
X3.5	0.546	0.258	Valid
X3.6	0.408	0.258	Valid
X3.7	0,500	0.258	Valid
X3.8	0,583	0.258	Valid
X3.9	0,305	0.258	Valid
X3.10	0,537	0.258	Valid
X3.11	0,432	0.258	Valid
X3.12	0,622	0.258	Valid
X3.13	0,543	0.258	Valid
X3.14	0,477	0.258	Valid
X3.15	0,523	0.258	Valid
X3.16	0,590	0.258	Valid
X3.17	0,649	0.258	Valid
X3.18	0,562	0.258	Valid
X3.19	0,484	0.258	Valid
X3.20	0,562	0.258	Valid
X3.21	0,507	0.258	Valid
X3.22	0,548	0.258	Valid
X3.23	0,473	0.258	Valid
X3.24	0,551	0.258	Valid
X3.25	0,583	0.258	Valid

Sumber: Data Olahan

Uji Normalitas Data

Suatu data dikategorikan berdistribusi normal apabila hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,947. Nilai ini menunjukkan jika data tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika data di sini memenuhi asumsi normalitas, sehingga asumsi klasik dalam analisis regresi dapat diterima.

Tabel 5. Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Keterangan
Unstandardized Residual		
N	56	Normal
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.947	

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Uji Multikolonieritas

Model regresi dapat dikatakan memenuhi syarat kelayakan apabila terbebas dari gejala multikolinearitas. Untuk memastikan hal tersebut, dilakukan pengujian menggunakan nilai VIF dan tolerance. Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain.

Tabel 6. Hasil uji multikoloneritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Aparatur Desa	0,385	2,597
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,385	2,600
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,870	1,149

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji multikolinearitas menjelaskan jika seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Adapun nilai Tolerance yang seluruhnya berada di atas 0,1 dan nilai VIF yang berada di bawah ambang batas 10. Kompetensi aparatur desa dan SPIP memiliki nilai Tolerance sebesar 0,385 dan VIF masing-masing 2,597 dan 2,600, sementara pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai Tolerance 0,870 dan VIF 1,149. Sehingga tidak ada kaitan linear yang kuat antar variabel independen yang mampu memberikan dampak validitas model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Dalam rangka mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 7. Hasil uji heteroskedastisitas

Variabel Independent	T	Sig.
Kompetensi Aparatur Desa	0,701	0,486
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,715	0,478
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,067	0,968

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji heteroskedastisitas menjelaskan jika tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) seluruh variabel independen yang berada di atas 0,05. Kompetensi aparatur desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,486, sistem SPIP sebesar 0,478, dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,968. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga varians dari residual bersifat konstan serta model regresi layak untuk digunakan.

Uji Autokorelasi

Gunawan, C. (2017:100) menjelaskan bahwa autokorelasi merupakan suatu kondisi di mana terdapat hubungan atau keterkaitan antara elemen-elemen dalam rangkaian data berdasarkan urutan waktu tertentu, sehingga bisa menimbulkan pola yang memengaruhi keakuratan model. Dalam analisis regresi, keberadaan autokorelasi menjadi indikator bahwa model belum optimal, sebab model yang baik seharusnya tidak mengandung autokorelasi. Oleh karena itu, pengujian autokorelasi dilaksanakan dalam mendeteksi adanya kaitan antara nilai residual (kesalahan) pada satu waktu dengan nilai residual pada waktu sebelumnya. Jika pengujian awal menggunakan Durbin-Watson (DW test) menunjukkan hasil yang tidak memuaskan atau tidak lolos uji, maka pendekatan yang bisa dilaksanakan ialah dengan menerapkan uji run test. Adapun interpretasi hasil run test dilaksanakan dengan nilai signifikansi Asymp. Sig, yaitu: apabila nilainya kurang dari 0,05 maka disimpulkan terdapat

autokorelasi, sedangkan jika lebih dari 0,05 maka sehingga diartikan tidak ada autokorelasi dalam model tersebut.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi (Runs Test)

Unstandardized Residual	
Test Value(a)	-,04782
Cases < Test Value	28
Cases ≥ Test Value	28
Total Cases	56
Number of Runs	32
Z	,809
Asymp. Sig. (2-tailed)	,418

Berdasarkan hasil SPSS pada tabel Runs Test terlihat nilai Asym. Sig. (2-tailed) sebesar 0,418 > 0,05 maka tidak terjadi Autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Uji ini memiliki tujuan dalam menganalisis apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel depende.

Tabel 9. Hasil uji regresi linear berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t		Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error	
1	(Constant)	13,155	3,692		3,563		,001
	Kompetensi Aparatur Desa	,072	,112	,080	,639		,525
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	,593	,102	,728	5,795		,000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,002	,033	,005	,056		,956

Uji Ketepatan Model (Uji F)

Berdasarkan hasil didapatkan jika nilai signifikansi F sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Adapun, nilai F hitung sebesar 28,738 ternyata lebih besar dibandingkan dengan F tabel yang bernilai 2,769. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil uji F memberikan bukti kuat jika model regresi yang dilaksanakan dengan layak dalam mengestimasi dampak pada variabel independen secara simultan pada variabel dependen. Dengan kata lain, secara keseluruhan variabel bebas yang diuji secara bersama-sama memiliki kontribusi yang signifikan pada perubahan pada variabel terikat.

Tabel 10. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	279.760	3	93.253	28.738	.000 ^b
	Residual	168.747	52	3.245		
	Total	448.500	55			

a. Dependent Variable: Total_Y
b. Predictors: (Constant), Total_A, Total_B, Total_C

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS

Uji T

Uji t bertujuan untuk menilai kemampuan setiap variabel independen dengan memberikan kontribusi pada perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara sendiri-sendiri. Dengan kata lain, pengujian ini dilaksanakan dalam menganalisis setiap faktor bebas secara individu memiliki dampak yang berarti pada variabel yang dipengaruhi. Penilaian dilakukan dengan signifikansi sebesar 5% atau 0,05, sebagai batas untuk menentukan apakah pengaruh tersebut dapat dianggap signifikan secara statistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ghazali (2018:97), dalam menafsirkan hasil uji ini, digunakan pedoman bahwa jika nilai signifikansi yang diperoleh berada di bawah angka 0,05, maka bisa diartikan jika variabel independen tersebut mempunyai dampak yang baik pada variabel dependen secara parsial. Artinya, variabel bebas tersebut secara individual mampu menjelaskan atau berdampak pada variabel terikat secara bermakna pada model yang diuji.

Tabel 11. Hasil Uji T

No.	Variabel	Hipotesis	Unstandardized Coefficient (b)	Sig	Keterangan	Kesimpulan
1.	Kompetensi Aparatur Desa	Positif	5,502	0,000	Positif & Signifikan	Diterima
2.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Positif	9,476	0,000	Positif & Signifikan	Diterima
3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Positif	2,135	0,037	Positif & Signifikan	Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini dilaksanakan dalam penilaian model regresi yang dibangun dapat menggambarkan perbedaan yang terjadi pada variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis dalam tabel 4, R sebesar 0,790, yang merefleksikan terdapat kaitan dengan kategori sedang antar beberapa variabel yang dianalisis. Sementara itu, nilai adjusted R Square sebesar 0,602 atau 60,2% perubahan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sisanya, yaitu 39,8%, berasal dari pengaruh faktor lain.

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,790(a)	,624	,602	1,801

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan yang ditampilkan pada tabel 4, didapatkan nilai t hitung 0,639, sedangkan nilai t tabel ialah 1,673. Adapun, nilai signifikansi 0,525, yang jauh lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yakni 0,05. Temuan ini menunjukkan jika variabel kompetensi aparatur desa tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada akuntabilitas penataan keuangan desa, disebabkan nilai t hitung lebih rendah dari t tabel dan nilai signifikansi melebihi batas. Hasil ini bertentangan dengan prinsip Agency Theory, yang menyatakan bahwa terdapat beda keinginan antara pihak pemberi amanah dan pihak pelaksana seharusnya dapat diminimalkan melalui kompetensi yang memadai. Tidak signifikkannya pengaruh ini bisa disebabkan oleh perbedaan tingkat keahlian individu aparatur desa, di mana kompetensi yang dimiliki belum tentu terimplementasi secara optimal dalam menunjang kinerja yang akuntabel. Meskipun kompetensi merupakan faktor penting, akan tetapi tidak begitu saja menjadi jaminan kuat jika aparat desa mempunyai keterampilan yang memadai dalam mengelola dana secara efektif. Kompetensi perlu ditunjang dengan keterampilan praktis dan pendampingan yang relevan terkait dengan tata kelola keuangan desa. Rendahnya tingkat pendidikan maupun kapasitas keterampilan aparat desa, garda terdepan pada penataan keuangan desa, dapat menjadi penyebab lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan tersebut. Hal ini diperkuat oleh temuan kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden aparatur desa berlatar belakang pendidikan SMA, sehingga tingkat kompetensi yang rendah dapat berdampak pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa. Temuan ini selaras dengan pendapat Subroto (2010) yang menyatakan jika keterbatasan kualitas SDM merupakan hambatan utama dalam pembagian keuangan desa. Ketika keterampilan masih rendah, tidak didukung oleh sistem pengawasan dan evaluasi yang memadai, maka akan timbul perbedaan signifikan pada penataan dana di tingkat desa, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, Irma (2015), yang menjelaskan jika keterampilan aparat desa mempunyai dampak baik pada terciptanya akuntabilitas dalam penataan keuangan desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Temuan ini menunjukkan jika sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan pada akuntabilitas dalam penataan keuangan desa. Sehingga, secara parsial, SPI terbukti mendorong secara nyata dengan menjelaskan variabel akuntabilitas. Hasil ini didukung oleh Martini (2019) yang menjelaskan jika sistem pengendalian mempunyai peran penting pada peningkatan akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Sembawa. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Sugiri dan Sugiyanto (2017), yang menunjukkan jika sistem ini memiliki pengaruh secara baik serta signifikan pada akuntabilitas penataan keuangan desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Sistem Keuangan Desa (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa nilai t hitung lebih kecil daripada dengan t tabel dan nilai $sig.$ auh melebihi batas α yang telah ditentukan. Temuan ini menjelaskan jika penggunaan teknologi dalam sistem dana desa belum berpengaruh signifikan pada peningkatan akuntabilitas dalam penataan keuangan desa. Artinya, meskipun sistem keuangan berbasis teknologi telah digunakan, hal tersebut belum mampu menjamin tercapainya transparansi dan pertanggungjawaban yang optimal. Satu dari banyak faktor ialah masih adanya kendala dalam pemahaman teknis dari perangkat desa terhadap sistem yang digunakan, yang berpotensi menimbulkan kesalahan saat menginput data. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberadaan teknologi saja tidak cukup; dibutuhkan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar akuntabilitas dapat diwujudkan secara menyeluruh. Jika pembaruan teknologi dilakukan secara bertahap, maka perangkat desa dituntut untuk semakin memahami cara kerja dan penggunaan sistem tersebut secara mendalam. Namun, kenyataan ini justru bertentangan dengan asumsi dalam teori agensi, yang menganggap bahwa peningkatan pengendalian internal akan berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pengendalian internal diperkuat melalui teknologi, dampaknya pada akuntabilitas penataan keuangan desa tetap rendah. Ini mengindikasikan jika peran pengendalian internal dalam mendorong akuntabilitas masih terbatas. Padahal, secara ideal, sistem keuangan desa (*siskeudes*) dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mencatat seluruh aktivitas keuangan secara sistematis. Hasil ini sejalan dengan temuan Pahlawan et al. (2020) yang menjelaskan jika penggunaan teknologi sistem keuangan desa tidak memberikan pengaruh signifikan pada akuntabilitas penataan keuangan desa. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat dalam literatur, seperti yang diungkapkan oleh Putra dan kolega (2016), yang menemukan bahwa teknologi sistem keuangan desa justru mempunyai dampak positif pada peningkatan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Hasil analisis didapatkan jika dari tiga variabel independen yang diuji, hanya SPIP Desa yang berpengaruh signifikan pada variabel dependen yaitu akuntabilitas penataan dana desa. Sementara itu, Kemampuan Perangkat Desa serta Pemanfaatan Teknologi Sistem Dana Desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada akuntabilitas dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan jika keberadaan dan efektivitas sistem pengendalian internal memiliki peran krusial dalam menjamin tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Sebaliknya, tidak berpengaruhnya kompetensi dan teknologi dapat mengindikasikan adanya celah dalam hal pelatihan, pelaksanaan, atau integrasi yang perlu ditelaah lebih lanjut. Untuk peneliti yang akan datang, agar dapat memberikan tambahan variabel moderasi atau mediasi lain seperti budaya organisasi, gaya kepemimpinan, atau partisipasi masyarakat yang mungkin memengaruhi atau memperkuat hubungan antara kompetensi, pemanfaatan teknologi, dan akuntabilitas. Selain itu, pendekatan longitudinal atau kualitatif juga dapat digunakan agar menambah wawasan yang lebih dalam terhadap berbagai indikator perilaku dan sistemik yang memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurelia, D., Sudirman, R., & Hapid, H. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.25273/inventory.v7i1.16183>
- Aziiz, D. S., M, N., & Prastiti. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *J. Akunt. Aktual*, 6(2), 334–344.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.*, 18-April-2016(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Christoph, N. G., Möckel, J., & Mehlhase, A. (2015). Exploiting Variable-Structure models in the context of building simulations within modelica. *14th International Conference of IBPSA - Building Simulation 2015, BS 2015, Conference Proceedings*.
- Esperon, D. G., Mehlhase, A., & Karbe, T. (2015). Appending variable-structure to modelica models (WIP). *Simulation Series*, 47(10).
- Ghozali, I. (2015). Aplikasi Analisis Multivariance dan Program SPSS. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.
- Juniarti, U., Adha Inapty, B., & Rakhmawati, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3). <https://doi.org/10.29303/Risma.V2i3.298>
- Kahono, S., Junaidi, M., & Nuswanto, A. H. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Asas Contrarius Actus Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1). <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2351>
- Maulana, S. R., & Napisah, L. S. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa dan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(1).
- Nurjaya, N., Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 4(3). <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v4i3.10460>
- Putri Lestari, N., Suprihati, & Kristiyanti, L. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Sambu Boyolali. *J. Ilm. Keuang. Akunt. Bisnis*, 2(2), 327–335. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i2.47>
- Saputra, A. (2024). *Peran Sistem Keuangan Desa Online (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah*. 4(1).
- Stüber, M. (2017). Simulating a Variable-structure Model of an Electric Vehicle for Battery Life Estimation Using Modelica/Dymola and Python. *Proceedings of the 12th International Modelica Conference, Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017*, 132. <https://doi.org/10.3384/ecp17132291>
- Sukmawidewi, K., & Nugraha, D. S. (2021). Peran kompetensi aparatur desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa : Studi kasus di Desa Sukasenang , Kabupaten Garut. *Prosiding The 12th Industrial Research Work and Natonal Seminar*, 12(1).
- Zimmer, D., Otter, M., Elmqvist, H., & Kurzbach, G. (2014). Custom Annotations: Handling Meta-Information in Modelica. *Proceedings of the 10th International Modelica Conference, March 10-12, 2014, Lund, Sweden*, 96. <https://doi.org/10.3384/ecp14096173>